

Strategi Negosiasi Jepang dalam *Comprehensive and Progressive Agreement For Trans-Pacific Partnership* (CPTPP)

Hilfi Biyan Firza

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia

Email: hilfibiyan@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini akan membahas mengenai strategi negosiasi Jepang di dalam negeri dan di luar negeri dengan mempertahankan *win-set* yang menjadi acuan dalam negosiasi. Setelah melakukan beberapa kali perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain, sektor agrikultur Jepang masih belum juga diliberalisasi. Pemerintahan Jepang dalam hal liberalisasi sektor pertanian selalu mengalami penolakan dari Organisasi Serikat Agrikultur (*JA Zenchu*) yang memiliki pengaruh kuat di politik Jepang. Begitu pula pada awal Jepang memutuskan untuk ikut dalam kerja sama *Trans Pacific Partnership*. Organisasi ini menentang keikutsertaan Jepang terutama pada isu liberalisasi perdagangan di bidang agrikultur. Kerja sama *Trans Pacific Partnership* berubah menjadi *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans Pacific Partnership* dan menjadi perjanjian pertama bagi Jepang yang mengikutsertakan isu agrikultur secara masif. Kajian terdahulu perihal TPP atau CPTPP banyak membahas mengenai alasan, hambatan, serta keuntungan Jepang mengikuti CPTPP, tetapi belum ada yang menjelaskan mengenai strategi Jepang dalam negosiasi perjanjian tersebut. Dengan menggunakan teori *two-level games* sebagai kerangka analisis, tulisan ini akan menjelaskan variabel-variabel dalam strategi negosiasi Jepang. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menjelaskan strategi yang digunakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Argumen utama dalam tulisan ini adalah strategi negosiasi Jepang di CPTPP di luar negeri dengan melakukan negosiasi paralel dengan Amerika Serikat. Sedangkan di dalam negeri strategi dilakukan dengan melakukan reformasi pada organisasi *JA Zenchu*. Strategi negosiasi yang dilakukan berhasil untuk mencapai kesepakatan CPTPP yang bisa diterima di dalam negeri Jepang.

Kata kunci: CPTPP, Jepang, strategi, TPP, *two-level Games*

Abstract

This paper will discuss the Japanese negotiation strategy at home and abroad by maintaining the win-set as a reference in the negotiations. After several free trade agreements with other countries, Japan's agricultural sector has not yet been liberalized. The Japanese government in terms of liberalization of the agricultural sector has always experienced resistance from the Organization of Agricultural Unions (JA Zenchu) which has a strong influence on Japanese politics. Similarly, at the beginning of Japan's decision to participate in the Trans Pacific Partnership cooperation, this organization opposed Japan's participation especially on the issue of trade liberalization in agriculture. The Trans Pacific Partnership turned into a Comprehensive and Progressive Agreement for the Trans Pacific Partnership and became the first agreement for Japan to engage in agricultural issues on a massive scale. Previous studies regarding the TPP or CPTPP mostly discussed the reasons, obstacles and advantages of Japan following CPTPP, but no one has explained the Japanese strategy in negotiating the agreement. Using the theory of two-level games as an analytical framework, this paper will explain the variables in the Japanese negotiation strategy. This paper uses qualitative research methods in explaining the strategies used. The data used in this research is secondary data. The main argument in this paper is the Japanese negotiation strategy in CPTPP abroad by conducting parallel negotiations with the United States. Whereas in the domestic strategy is carried out by reforming the JA Zenchu organization. The negotiation strategy carried out was successful in reaching an acceptable CPTPP agreement within Japan.

Keywords: CPTPP, Japan, strategy, TPP, *two-level games*

PENDAHULUAN

Jepang telah melakukan liberalisasi sejak tahun 1990-an. Proses liberalisasi yang dilakukan tidaklah mudah, karena tidak lepas dari penentangan yang terjadi di wilayah domestik Jepang, terutama pada liberalisasi produk-produk agrikultur. Namun, dengan semakin masifnya liberalisasi yang terjadi di dunia, Jepang tidak bisa menghindari dari proses liberalisasi tersebut. Dari situ menarik untuk diamati, bagaimana Jepang melakukan liberalisasi dengan tetap mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam bidang agrikultur.

Proses liberalisasi yang terjadi di Jepang dimulai sejak melakukan negosiasi perdagangan bebas (*Free Trade Agreement* atau FTA) dengan Meksiko pada tahun 1999. Pada tahun 2001, Jepang melakukan negosiasi FTA dengan Singapura dalam kerangka *Japan-Singapore Economic Partnership Agreement* (JSEPA) yang disahkan dan diimplementasikan pada tahun 2002. Sampai tahun 2019, Jepang telah memiliki 18 perjanjian perdagangan bebas yang telah ditandatangani atau diimplementasikan (Singapura, Meksiko, Malaysia, Chili, Thailand, Indonesia, Brunei, ASEAN, Filipina, Swiss, Vietnam, India, Peru, Australia, Mongolia, TPP12, TPP11/ CPTPP, Uni Eropa); 5 perjanjian dalam tahap negosiasi (ASEAN, Kolombia, Japan-China-ROK, RCEP, Turki); dan 3 perjanjian yang ditunda (*Gulf Cooperation Council* (GCC), Korea, Kanada).

Perjanjian perdagangan bebas yang telah dilakukan oleh Jepang sering dibuat dengan mempertimbangkan impor produk agrikultur Jepang dengan negara terkait. Hal tersebut menyebabkan, walaupun sudah memiliki FTA dengan beberapa negara, pada tahun 2011 Jepang masih memiliki tarif rata-rata 5.3 persen dan rata-rata tarif sebesar 22.8 persen untuk agrikultur. Tarif tersebut lebih tinggi dari Amerika Serikat (AS) tetapi lebih rendah

jika dibandingkan dengan Uni Eropa (Sasada, 2013: 227).

Keikutsertaan Jepang dalam kerja sama TPP didorong oleh dari pidato Perdana Menteri (PM) Naoto Kan yang berasal dari partai DPJ pada bulan Oktober 2010 yang menginginkan untuk mengikuti perundingan TPP. Sejak saat itu terjadi pro dan kontra di masyarakat Jepang. Pihak pro berasal dari sektor manufaktur sedangkan pihak anti-TPP berasal dari sektor agrikultur, yang selama ini mendapatkan proteksi tinggi dari pemerintah Jepang dalam bentuk subsidi, pengenaan tarif dan kuota. PM Kan melakukan proses koordinasi internal dengan para anggota kabinet dengan harapan memperoleh keputusan pada Juni 2011. Rencana tersebut tertunda setelah terjadinya kebocoran nuklir Fukushima Daichi.

Pada masa PM Yoshihiko Noda, rencana masuk perundingan TPP kembali digulirkan dan isu tersebut membelah kabinet PM Noda menjadi dua blok. Blok pertama yaitu blok pendukung yang dipimpin oleh Menteri Yukio Edanno dari Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI). Blok ke dua dipimpin oleh Menteri Michihiko Kano dari Kementerian Agrikultur, Kehutanan dan Perikanan (MAFF). Blok ini percaya bahwa perundingan TPP akan memaksa Jepang melakukan liberalisasi sektor pertanian yang selama ini dilindungi (Nurdiniyah, 2016: 2). Rencana PM Noda gagal untuk mencapai konsensus sehingga Jepang tidak dapat bergabung dalam perundingan TPP. Kegagalan tersebut juga membuat DPJ kalah dalam pemilu tahun 2012.

Setelah kekalahan tersebut, Jepang kembali dipimpin oleh LDP dengan Shinzo Abe sebagai pemimpinnya. PM Abe menganggap TPP sebagai pilar penting dalam reformasi struktur yang ada dalam kebijakan "*Abenomics*". PM Abe secara berhati-hati mengungkapkan keinginannya untuk mengikuti negosiasi TPP. Namun, keinginan PM Abe terkendala karena

sebelum dia menjabat, pada tahun 2011, lebih dari 80 persen anggota LDP di *Diet* atau Parlemen Jepang (166 dari 200) secara publik mengatakan tidak akan mendukung Jepang masuk ke TPP (Sasada, 2013: 245).

Organisasi agrikultur *JA Zenchu* yang selama ini mendukung LDP juga menginginkan lebih dari 800 item pertanian untuk tidak terkena dampak pengurangan tarif jika Jepang masuk dalam perjanjian TPP. *JA Zenchu* juga mengancam akan menarik dukungannya bagi LDP dan New Komeito di pemilu *House Councilors* jika tetap masuk TPP dan mengikuti prinsip penghilangan tarif tanpa pengecualian. Namun, setelah perdebatan internal, LDP secara formal mengumumkan mendukung keputusan PM Abe dan mengumumkan lima item produk yang harus dilindungi yaitu beras, produk gula, gandum, produk susu, dan daging sapi (Cooper dan Manyin, 2013: 278).

Proses perundingan Jepang dalam TPP yang dimulai sejak tahun 2013 hingga tahun 2015 berjalan alot, terutama pada produk sensitif agrikultur seperti isu non-tarif *intellectual property*, *state-owned enterprises*, dan investasi. Negosiasi TPP akhirnya mencapai kesepakatan dengan ditandatanganinya kerja sama TPP di Auckland, Selandia Baru pada 4 Februari 2016. Di bawah kesepakatan TPP, Jepang akan menghilangkan tarif dalam 8575 item dengan adanya pengecualian pada 443 item agrikultur, termasuk beras, produk gula, gandum, susu, dan daging sapi (Kagitani, 2018: 6).

Pada tahun 2017, setelah AS keluar dari TPP, keikutsertaan Jepang dalam kerja sama tersebut sempat dipertanyakan. Namun, ternyata Jepang memutuskan untuk melanjutkan kerja sama dan mengambil peran penting dalam TPP. Jepang melanjutkan kerja sama tersebut dalam kerangka *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP) atau TPP11 (Sim, 2017). CPTPP berhasil diwujudkan tanpa adanya keterlibatan dari AS dan mulai

berlaku sejak Desember 2018 setelah syarat ratifikasi terpenuhi. CPTPP berbeda dengan TPP karena terdapat 22 bab dari kesepakatan TPP yang dinegosiasi ulang dalam CPTPP yang sebagian besar merupakan item yang diusung oleh AS.

Artikel-artikel tulisan yang sudah ada mengenai Jepang dan TPP atau CPTPP kebanyakan membahas mengenai alasan Jepang mengikuti TPP dan hambatan Jepang mengikuti TPP, seperti dalam tulisan Mireya Solis dan Shujiro Urata (2018) dan Davis (2018) yang mengungkapkan alasan Jepang mengikuti TPP karena ingin mendekatkan hubungan Jepang dan AS karena hubungan kedua negara yang sempat merenggang. Selain itu, TPP akan memberikan efek positif pada pertumbuhan ekonomi Jepang dan bentuk *balancing* China di kawasan Asia Pasifik. Tulisan William H. Cooper dan Mark E. Manyin (2013) lebih menekankan pada permasalahan Jepang saat awal akan masuk dalam negosiasi TPP terutama masalah pembatasan impor daging sapi dan akses pasar bagi mobil buatan Amerika Serikat. Artikel lain yang ditulis oleh Tomohito Shinoda (2019) melihat masuknya Jepang ke TPP melalui teori *two-level game*. Artikel tersebut menekankan pada beberapa faktor yaitu fleksibilitas tim negosiator AS, terutama setelah selesainya FTA antara Jepang dan Australia serta adanya faktor insiatif China terhadap AIIB yang membuat terwujudnya kesepakatan antara Jepang dan Amerika Serikat.

Tulisan-tulisan di atas belum melihat CPTPP dari sudut pandang negosiasi di dalam negeri dan di luar negeri. Walaupun tulisan Shinoda membahas mengenai TPP menggunakan teori yang sama dengan tulisan ini, tetapi tulisan Shinoda tidak banyak membahas mengenai negosiasi dalam negeri Jepang seperti yang dilakukan oleh tulisan ini. Negosiasi dalam negeri, seperti negosiasi luar negeri, sama pentingnya untuk mendapatkan suatu sudut pandang baru dalam melihat masalah yang ada, sehingga menarik untuk melihat

kesuksesan Perdana Menteri Shinzo Abe dalam melakukan negosiasi CPTPP baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai bagaimana strategi pemerintah Shinzo Abe dalam melakukan negosiasi CPTPP sampai bisa diratifikasi dan diterima di dalam negeri melalui kerangka teori *two-level games*.

Kerangka Konseptual: *Two-level Game Theory*

Two-level game theory yang dikemukakan oleh Robert D. Putnam (1988) menjelaskan bahwa setiap negosiasi internasional dan kebijakan luar negeri merupakan permainan dua tingkat yaitu level domestik dan level internasional. Pada level domestik (Level II), elite politik berupaya untuk berkonsolidasi dengan publik maupun kelompok masyarakat karena merupakan faktor penekan terhadap pemerintah. Hal tersebut, dalam kasus tulisan ini, terdapat pada konsolidasi yang dilakukan oleh PM Shinzo Abe dengan masyarakat dan kelompok *JA Zenchu* serta konsolidasi di internal partainya. Sedangkan pada level internasional (Level I), pemerintah berupaya untuk memenuhi keinginan domestik untuk mengurangi tekanan yang muncul dari dalam negeri, namun sekaligus meminimalisir efek negatif terhadap hubungan maupun kerja samanya dengan negara lain sehingga persetujuan yang dihasilkan bisa diratifikasi di level domestik. Pemerintahan PM Shinzo Abe dalam hal ini berhasil menyeimbangkan keinginan di domestik dengan perundingan di tahap internasional sehingga kesepakatan yang dihasilkan sukses untuk diratifikasi oleh Diet pada 6 Juli 2018. Kesuksesan tersebut tidak terlepas dari pencapaian *win-sets* yang telah ditetapkan di dalam negeri seperti perlindungan pada lima produk agrikultur Jepang.

Menurut Putnam, kemungkinan persetujuan yang negosiator mungkin akan

terima di tingkat internasional ditentukan oleh "*win-sets*" di level domestik. *Win-sets* yang diformulasikan oleh Putnam menitikberatkan pada peran yang sangat besar dari konstituen domestik dalam menetapkan batas-batas kebijakan luar negeri pemerintah. Lebih lanjut lagi, Putnam menyatakan, *win-sets* yang lebih lebar akan berdampak kepada fleksibilitas dan keberhasilan kebijakan maupun kerja sama yang dilaksanakan negara di level internasional, sehingga dengan *win-sets* yang besar akan terjadi tumpang tindih. Tumpang tindih itulah yang akan mungkin menjadi kesepakatan dalam level I dan diterima di level II. Sementara itu, *win-sets* yang memiliki batasan sempit akan semakin mempersempit ruang gerak pemerintah untuk melaksanakan negosiasi luar negerinya sehingga lebih mungkin negosiasi yang dilakukan tidak akan menghasilkan kesepakatan.

Dalam tulisan ini, penentuan *win-sets* yang dominan dari konstituen level domestik Jepang berfokus pada perlindungan produk-produk agrikultur Jepang agar tetap bisa bersaing di dalam negeri. Produk-produk agrikultur Jepang merupakan produk yang selama ini dilindungi oleh Pemerintah Jepang. Seperti yang ditulis pada bagian pendahuluan, bidang agrikultur Jepang jarang sekali menjadi suatu poin kesepakatan dalam setiap kerja sama perdagangan bebas yang telah ditandatangani Jepang.

Dinamika sosial politik yang terjadi di dalam negeri Jepang tersebut menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan pemerintah Jepang dalam melakukan negosiasi pada level internasional. *Win-set* di level domestik Jepang tersebut berselisih dengan apa yang diharapkan dari CPTPP yaitu pengurangan hingga menghapus tarif bagi produk-produk perdagangan salah satunya produk agrikultur, sehingga perlu adanya negosiasi agar tercapai kesepakatan.

Metode Penelitian

Berdasarkan penjabaran kerangka konseptual di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan dan mengidentifikasi variabel-variabel kerangka pemikiran yang ada untuk mendapatkan hasil (Neuman, 2003: 67). Penghimpunan data dari penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder mengenai negosiasi dan strategi pemerintahan Shinzo Abe di dalam negeri dan di luar negeri untuk meratifikasi perjanjian CPTPP dengan rentan waktu dari tahun 2012 (setelah Shinzo Abe menjabat) sampai 2019. Data sekunder tersebut dikumpulkan melalui buku, jurnal, artikel dari media daring terkait serta data yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu deskriptif eksplanatif untuk menjelaskan strategi-strategi Shinzo Abe dalam meratifikasi CPTPP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tulisan ini akan dibagi dua dalam sub-bab untuk melihat kebijakan Jepang pada kerja sama CPTPP, yaitu melihat negosiasi dalam level internasional dan negosiasi dalam level domestik. Untuk melihat bagaimana berjalannya negosiasi di kedua tingkatan tersebut, penulis menggunakan tiga *win-sets*, yaitu pada Level II preferensi dan koalisi, Level II institusi, dan Level I strategi negosiasi. Ukuran *win-sets* ditentukan oleh ukuran relatif faktor “isolasionis” (yang menolak kerja sama internasional secara umum) dan “internasionalis” (mendukung kerja sama internasional).

Jepang dalam Negosiasi Level Internasional

Jepang sebelum mengikuti negosiasi perundingan TPP telah melakukan konsultasi preliminar. Hal tersebut

dilakukan sebagai upaya pemerintah Jepang untuk memperluas dan memberikan kemungkinan fleksibilitas *win-sets* yang akan ditawarkan Jepang dalam negosiasi TPP. Preliminer dilakukan melalui *committee on Regional Diplomatic and Economic Partnership* yang diketuai oleh Seishiro Eto, Mantan Wakil Ketua *lower House*. Komite tersebut menghasilkan resolusi berisikan enam item yang harus dilindungi yaitu lima produk pertanian, kehutanan, dan perikanan serta asuransi kesehatan Jepang.

Berdasarkan preliminar yang telah dilakukan, terbentuk sebuah kemungkinan *win-sets* yang bisa diterima pada level domestik yaitu adanya pembatasan pengurangan tarif pada lima produk agrikultur seperti beras, produk gula, gandum, produk susu, dan daging sapi. Kesepakatan di dalam negeri antara JA *Zenchu* dan pemerintahan PM Abe dijadikan sebagai acuan negosiasi atau *win-sets* dalam melakukan negosiasi TPP. Setelah adanya kesepakatan *win-sets* di dalam negeri, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe membuat badan yang khusus yang menangani negosiasi dan keikutsertaan Jepang dalam TPP yang diketuai oleh Menteri Ekonomi Akira Amari serta tim yang berurusan dengan negosiasi yang beranggotakan Menteri Luar Negeri Koji Tsuruoka dan tim domestik yang diketuai oleh kepala sekretaris kabinet Toyonari Sasaki.

Jepang secara resmi mengikuti negosiasi TPP setelah putaran ke-16 dilakukan yaitu pada 24 April 2013 saat kantor Representatif Perdagangan Amerika Serikat (USTR) mengumumkan pemberitahuan kepada kongres akan intensi untuk menyertakan Jepang dalam perundingan TPP. Baru pada putaran ke-18 yang diadakan di Kota Kinabalu, Malaysia pada 15-25 Juli 2013, Jepang mulai ikut aktif dalam negosiasi TPP. Keanggotaan Jepang dalam TPP disambut dan diresmikan pada 23 Juli 2013 pada putaran tersebut.

Proses negosiasi yang dilakukan oleh Jepang menekankan pada *win-set* yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk memperoleh *win-set* tersebut Tim negosiator TPP yang diketuai Menteri Amari melakukan strategi negosiasi paralel. Strategi ini diterapkan dengan melakukan negosiasi secara paralel yang dilakukan secara bilateral dengan Amerika Serikat yang mulai dilakukan pada 7-9 Agustus 2013 dan secara multilateral dalam forum putaran negosiasi TPP. Strategi ini dilakukan oleh Jepang karena melihat kekuatan Amerika Serikat dalam forum TPP tersebut. Amerika Serikat merupakan negara dengan ekonomi terbesar di TPP dan merupakan motor penggerak TPP sehingga dengan melakukan negosiasi bilateral terlebih dahulu dengan Amerika Serikat diharapkan akan membuat mudah dalam perundingan dengan anggota TPP lainnya. Setiap hasil negosiasi bilateral antar kedua negara yang disepakati berlaku untuk setiap anggota TPP sehingga hal ini membuat kedua negara ini menjadi negosiator bayangan bagi seluruh anggota TPP.

Negosiasi pada forum TPP pada putaran perundingan ke 19 pada tanggal 22-30 Agustus 2013 di Brunei menghasilkan kesepakatan bagi negara untuk menyusun daftar komoditas berdasarkan waktu penghapusan tarif yang terbagi ke dalam tiga kategori "*immediate elimination*", "*gradual elimination*" dan "*undecided*". Jepang yang dipimpin oleh Menteri Amari membuat proposal dengan memasukkan produk otomotif dan elektronik dalam kategori "*immediate elimination*" sedangkan pertanian ke dalam kategori "*undecided*" (Brooks, 2015: 60).

Negosiasi antara Jepang dan Amerika Serikat ini fokus pada isu pengurangan tarif atau eliminasi lima produk yang dilindungi Jepang seperti produk agrikultur serta dari sisi Amerika Serikat lebih pada sisi liberalisasi sektor automobil. Negosiasi ini menjadi penting terutama karena negosiasi ini merupakan negosiasi antara dua

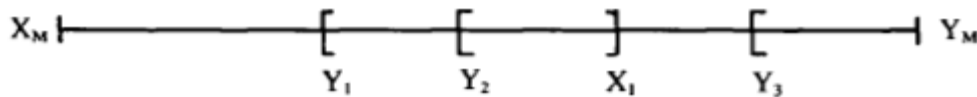
kekuatan ekonomi terbesar dalam TPP. Selain itu, kedua negara ini merepresentasikan dua golongan yaitu negara-negara produsen agrikultur yang merupakan negara berkembang serta kepentingan AS sebagai negara maju untuk mengeliminasi produk agrikultur di negara-negara berkembang. Oleh sebab itu, banyak negara yang melakukan pendekatan *wait and see* terhadap negosiasi tersebut, karena hasil negosiasi kedua negara bisa diterapkan dalam negosiasi dalam TPP.

Strategi negosiasi bilateral paralel dengan AS sempat membuat Jepang akan melakukan *voluntary defection* karena menganggap bahwa perjanjian dengan AS tidak akan membuahkan hasil yang akan diterima di dalam negeri. Tekanan negosiasi yang terus dilakukan oleh AS membuat Menteri Amari memberikan pernyataan bahwa Jepang akan mundur dari TPP jika terus dipaksa untuk mengurangi tarif produk sensitif pada bulan Februari 2014 (Hamanaka, 2014: 179). Negosiasi bilateral antara AS dan Jepang terhalang oleh keinginan kedua negara untuk mempertahankan status quo bagi Jepang terhadap lima produk agrikultur dan AS terhadap proposal liberalisasi automobil. Dari ancaman tersebut, Jepang dan AS sepakat untuk tidak mengeliminasi produk pertanian Jepang. Sebagai kompensasinya, tarif untuk beras, gandum, dan gula akan tetap dipertahankan, tetapi kuota untuk beras AS diperbanyak, kuota untuk gandum diturunkan dan tarif produk susu dan daging akan diturunkan (Brooks, 2015: 66-68). *Voluntary defection* dalam hal ini dilakukan sebagai salah satu strategi negosiasi Jepang untuk memperoleh posisi tawar yang lebih besar dalam negosiasi TPP.

Pada bagian negosiasi produk daging sapi ini, Jepang menekan AS melalui *Free Trade Agreement* (FTA) dengan Australia yang telah efektif berlaku sejak 15 Januari 2015. FTA Jepang-Australia dilakukan untuk memberikan tekanan pada negosiasi FTA Jepang dengan AS. FTA ini penting

karena pasar daging sapi di Jepang dikuasai oleh Australia sebesar 54 persen sedangkan Amerika Serikat hanya memegang pasar sebesar 35 persen. Dengan berlakunya FTA dengan Australia, produk daging sapi

Australia akan lebih kompetitif dibanding produk daging sapi dari AS yang belum mendapatkan reduksi atau eliminasi tarif seperti yang diterima oleh daging sapi asal Australia.



Sumber: Putnam, 1988: 441.

Gambar 1
Win-Sets Teori Putnam

Gambar 1 merupakan gambaran implikasi dari ukuran *win-set*, yang merepresentasikan *zero-sum game* antara X dan Y. Dalam penelitian ini, X merupakan simbol yang merepresentasikan TPP dan Y merupakan representasi bagi Jepang. X_M dan Y_M merupakan hasil maksimum bagi X (TPP) dan Y (Jepang). Sedangkan X_1 dan Y_1 merepresentasikan hasil minimal yang bisa diratifikasi. Dalam tahap ini, semua kesepakatan di jangkauan antara X_1 dan Y_1 bisa diratifikasi oleh kedua belah pihak. Jika *win-set* Y berubah menjadi Y_2 maka hasil kesepakatan di jangkauan antara Y_1 dan Y_2 tidak mungkin lagi menjadi satu pilihan, karena hal ini akan menguntungkan pihak Y. Namun, jika Y akan mereduksi *win-set*-nya hingga ke Y_3 maka hal ini akan mengakibatkan negosiator berada pada posisi yang *deadlocked* atau buntu karena *win-sets* keduanya tidak lagi saling tumpang tindih. Jika dilihat dari gambar 1, *win-sets* yang telah diterapkan X_M atau TPP adalah posisi awal atau keuntungan yang ingin dicapai dalam negosiasi yaitu menerapkan penghapusan tarif menjadi 0 persen, sedangkan Y_M adalah posisi atau keuntungan maksimal Jepang yang menginginkan untuk melindungi produk-produk agrikultur dari penghapusan tarif.

Dalam tulisan ini, negosiasi domestik Jepang akhirnya setuju pada ukuran *win-set* minimal atau bisa disebut juga Y_1 yaitu perlindungan pada lima produk pertanian, kehutanan dan perikanan, serta pos,

sedangkan dari level internasional masih menginginkan adanya pengurangan atau penghapusan tarif pada produk-produk agrikultur.

Win-sets Jepang pada akhir kesepakatan TPP, mengalami perubahan menjadi Y_2 , artinya Jepang setuju untuk melakukan pengurangan tarif pada kelima produk yang dilindungi namun tidak sampai pada tahap pengurangan hingga 0 persen tarif. Hal ini terlihat dalam hasil kesepakatan akhir TPP dengan persetujuan bahwa Jepang setuju untuk mengurangi 81 persen tarif dari 2328 produk pertanian, kehutanan dan perikanan. Perundingan di Atlanta pada 5 Oktober 2015 dihadiri oleh perwakilan kedua belas anggota TPP serta beberapa lobi industri pertanian dan farmasi dengan harapan untuk memperoleh keputusan akhir yang gagal dicapai di pertemuan Hawaii dua bulan sebelumnya. Pertemuan ini menandai kesepakatan persetujuan TPP, dengan perincian kesepakatan sebagai berikut (a) Tarif impor daging Sapi turun dari 38.5 persen menjadi 9 persen selama 16 tahun. Tarif lidah sapi sebesar 12.8 persen akan dihapuskan pada tahun kesebelas. (b) Daging babi berupa *higher-price pork* mengalami pengurangan dari 4.3 persen menjadi 2.2 persen dan pada tahun kesepuluh tarif akan dihapuskan.

Sedangkan tarif *low-price pork* yang semula 482 yen per kilogram menjadi 125 yen/kilogram. Setelah memasuki tahun kelima, tarif daging babi menjadi 70 yen dan

tahun kesepuluh menjadi 50 yen. Penerapan aturan *safeguard* produk impor meningkat dengan ketentuan tarif yang telah disetujui 70 yen dinaikkan menjadi 100 yen pada tahun ke sembilan, pada tahun kesepuluh dan kesebelas yang semula 50 yen menjadi 70 yen dan tahun kedua belas peraturan akan dihapuskan. (c) Produk susu berupa tarif keju akan dihapuskan setelah 16 tahun dan air susu sapi setelah 21 tahun. (d) Pada produk beras disetujui untuk menaikkan kuota impor untuk beras Amerika Serikat dari 50.000 ton menjadi 70.000 ton per tahun selama 13 tahun. Serta beras Australia dari 6.000 ton menjadi 8.400 ton selama 13 tahun. Selain itu Jepang juga dapat mempertahankan tarif beras impor 341 yen per kilogram (Takashi, 2015a).

Kesepakatan TPP tersebut merupakan sebuah kesuksesan bagi Jepang karena dalam kesepakatan tersebut Jepang akan mengeliminasi tarif sebesar 95 persen sedangkan negara lain mengeliminasi sebesar 99-100 persen tarif perdagangan.

Perundingan pada Level Domestik

Kesepakatan di tingkat internasional dibawa ke dalam tingkat domestik atau level II untuk dilakukan ratifikasi yang menandai persetujuan penerapan kesepakatan tersebut. Kesepakatan internasional dalam *two level games* dianggap berhasil setelah dilakukan ratifikasi di dalam negeri. Oleh karena itu, untuk dinyatakan berhasil, negosiator yang mewakili pemimpin negara harus bisa meyakinkan level domestik. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada level domestik, terdapat dua hal penentu kemenangan. Pertama adalah distribusi kekuasaan serta koalisi dan kedua adalah institusi kelembagaan (Putnam, 1988: 442).

Partai politik di Jepang memiliki karakteristik tersendiri dan karakteristik ini berpengaruh pada pembuatan kebijakan dan dukungan terhadap partai tersebut. Seperti partai DPJ yang berkuasa antara tahun 2009-2012 lebih berpihak pada

perdagangan bebas. Hal tersebut terjadi karena DPJ merupakan partai yang berbasis pemilih *urban* sehingga banyak kebijakannya mendukung perdagangan bebas. Namun DPJ selama berkuasa hanya berhasil menyelesaikan dua FTA dengan India dan Peru dan negosiasi untuk keduanya pun diinisiasi oleh LDP (Sasada, 2013: 230). Perdana Menteri Jepang yang berasal dari DPJ mendorong Jepang untuk mengikuti kerja sama perdagangan bebas multilateral seperti kerja sama TPP. Namun belum berhasil dilakukan

Partai berkuasa setelah DPJ yaitu partai LDP memiliki karakteristik kebijakan perdagangan bebas Jepang yang dikenal memberikan perlindungan terhadap produk agrikultur. Partai ini mendominasi politik Jepang sejak setelah Perang Dunia II antara tahun 1955-1993, tahun 1994-2009, dan tahun 2012 sampai sekarang. Kebijakan LDP dalam bidang perdagangan selalu mendukung perlindungan industri domestik, khususnya kebijakan agrikultur dari kompetitor asing. Terdapat beberapa alasan mengapa Jepang yang dipimpin oleh LDP melindungi produk agrikultur mereka. Salah satu alasan pentingnya adalah proses pembuatan keputusan dalam bidang agrikultur didominasi oleh "*iron triangle*", yang terdiri dari representasi petani dari *Nokyo (agricultural coop)* / *JA Zenchu*, LDP dan Kementerian Agrikultur, Kehutanan, dan Perikanan (MAFF) (Sasada, 2013). Namun pada masa Shinzo Abe, LDP mendukung untuk melakukan perdagangan bebas sektor agrikultur sehingga mempengaruhi distribusi kekuasaan yang telah terbangun sebelumnya.

Distribusi kekuasaan serta kolisi yang terjadi di saat Jepang melakukan negosiasi TPP, saat itu Jepang dipimpin oleh PM Shinzo Abe dari partai LDP yang berkoalisi dengan *New Komeito Party (NKP)*. Pada pemilihan *House of Representatives* tahun 2012 LDP memenangkan 294 total kursi serta NKP memenangkan 31 kursi sehingga keduanya memegang 325 kursi di *House of Representatives (Lower House)*. Sedangkan

pada tahun 2014, koalisi partai penguasa kembali memenangkan pemilu dengan total 326 kursi yang terdiri dari 291 kursi untuk LDP dan 35 kursi untuk Komeito (KM). Pemilu pada 22 Oktober 2017 dimenangkan oleh petahana dengan total kursi 313 terdiri dari 284 kursi LDP dan 29 kursi KM. Sedangkan di *Upper House* pada pemilu 10 Juli 2016 LDP memperoleh 55 kursi dan KM memperoleh 14 kursi sehingga total kursi kedua partai ini di *Upper House* 120 kursi untuk LDP dan 25 untuk KM jadi total 145 kursi untuk partai petahana. Keputusan Abe untuk melakukan pemilu pada Desember 2014 di *lower house* menjadi titik penting untuk memperoleh dukungan publik untuk melemahkan kekuatan JA Zenchu (Terada, 2015: 381). Hal tersebut penting karena menyangkut poin kelembagaan atau institusi yang diungkapkan oleh Putnam untuk melihat seberapa kuat posisi pemerintah untuk mengesahkan suatu Undang-undang.

Distribusi kekuasaan di luar pemerintahan dilihat dari seberapa besar dan efektifnya partai oposisi dan organisasi-organisasi yang menentang pemerintahan. Dalam politik Jepang untuk isu agrikultur, setiap usaha negosiasi di level internasional tidak akan bisa berjalan baik karena isu ini didukung oleh organisasi yang memiliki pengaruh besar dalam kebijakan Jepang. Negosiasi di dalam negeri Jepang mendapat banyak penolakan dari golongan petani yang tergabung dalam *Zenkoku Nogyo Kodo Kumiai Chuokai* (*Central Union of Agricultural Co-operatives*, atau *JA Zenchu*). Organisasi ini memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan kebijakan agrikultur di Jepang. Hal tersebut karena petani Jepang secara sistematis dimobilisasi oleh *JA Zenchu* (Krauss, 1995).

Terlihat pada tahun 2011, saat Jepang akan masuk ke dalam negosiasi TPP, organisasi ini melakukan demo dan mengumpulkan 11,7 juta tandatangan petisi penolakan Jepang untuk masuk pada TPP, sebelum pelaksanaan KTT APEC dilakukan di Honolulu. Selain itu, usaha *JA*

Zenchu dimasa lalu untuk melindungi produk-produk agrikultur Jepang terbilang sukses. Dari sejumlah FTA yang telah ditandatangani sebelum TPP, sebanyak 834 produk agrikultur, kehutanan, dan perikanan belum terkena aturan pengurangan tarif karena kuatnya lobi yang dilakukan oleh kelompok tersebut. *JA Zenchu* berhasil mengumpulkan dana 8 miliar yen per tahun, yang sebagian besar digunakan untuk mengorganisasikan kampanye penolakan TPP (Takashi, 2015b).

Distribusi kekuasaan dalam pembentukan kebijakan yang berkaitan dengan produk agrikultur juga memengaruhi *JA Zenchu*. Pemerintahan Shinzo Abe melakukan reformasi pada undang-undang kooperatif agrikultur. Reformasi pada *JA Zenchu* diusulkan oleh badan reformasi hingga pemerintahan PM Abe setuju untuk menghilangkan otoritas hukum untuk mengontrol dan mengelola organisasi agrikultur lokal. Organisasi ini hanya bisa berdiri sebagai asosiasi setelah masa transisi selama 3 tahun.

Reformasi yang dilakukan oleh Shinzo Abe menjadi strategi untuk memperlancar negosiasi CPTPP. Reformasi struktur agrikultur merupakan salah satu poin yang ada dalam tiga panah *Abenomics*. Organisasi *JA Zenchu* dijadikan target reformasi karena organisasi ini tidak pernah direformasi selama 60 tahun. Undang-undang kooperatif agrikultur yang baru telah mengurangi kekuasaan *JA Zenchu* untuk memantau dan mengaudit kelompok petani lokal, sehingga dengan aturan ini organisasi lokal bisa lebih otonom (Mulgan, 2016: 85). Dimulai dari bulan Oktober 2019, organisasi lokal bebas untuk memilih apakah akan diaudit oleh *JA Zenchu* atau oleh akuntan publik tersertifikat. Upaya reformasi awalnya mendapat penolakan dari para petani, meski internal organisasi akhirnya menerima dengan mundurnya ketua *JA Zenchu*, Akira Banzai seminggu setelah PM Abe memasukkan undang-

undang mengenai kooperatif agrikultur ke Diet (The Japan Times, 2015).

Untuk meredam demo dari petani yang akan terkena dampak dari pemberlakuan CPTPP, pemerintahan PM Abe memberikan *side-payment*. Bantuan ini dilakukan dengan meningkatkan subsidi yang dibayarkan langsung ke petani serta meningkatkan penghasilan petani dalam 10 tahun ke depan. *Side-payment* ini sejalan dengan panah ketiga dari kebijakan Abenomics (panah ketiga yaitu *growth strategy*) yaitu melakukan reformasi terutama di bidang pertanian agar produk agrikultur Jepang tetap kompetitif dan untuk menghadapi masalah populasi yang berkurang dan menua.

Keputusan pemerintahan Shinzo Abe di dalam negeri untuk mulai melakukan reformasi pertanian sejak April 2015, membuat Jepang mulai berani untuk melakukan negosiasi pada tahap internasional. Negosiasi yang dilakukan terutama pada tarif daging babi dan sapi. Namun, sebagai timbal balik penurunan tarif tersebut, Jepang menginginkan klausul *safe guard* yang memungkinkan Jepang untuk menaikkan tarif pada produk daging sapi dan babi AS ke tingkat semula jika impor kedua produk tersebut meningkat secara berlebihan. (Terada, 2015: 286).

Perjanjian TPP berubah menjadi CPTPP sejak AS keluar dari perjanjian tersebut. Sejak pemerintahan Donald Trump, AS berubah pada arah proteksi ekonomi, seperti keluar dari perjanjian TPP serta lebih fokus pada perdagangan bilateral dibandingkan perjanjian multilateral. Padahal pada pemerintahan Presiden Obama, TPP menjadi satu kebijakan penting AS di Asia. Terbukti pada pertemuan tingkat menteri TPP di Atlanta, tanggal 5 Oktober yang menghasilkan kesepakatan TPP. Presiden AS Barak Obama menyampaikan pentingnya TPP dengan mengatakan "*we can't let countries like China write the rules of the global economy. We should write those rules.*" (Shinoda, 2019: 8).

Keluarnya AS sempat membuat Jepang ragu untuk melanjutkan perjanjian. Namun, di dalam negeri, dukungan untuk tetap berada dalam kerja sama TPP datang dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari kalangan pebisnis Jepang, Federasi Bisnis Jepang atau *Keidanren* memiliki pengaruh yang cukup kuat bagi pemerintahan Jepang masa LDP (Mulgan, 2015: 144). Dukungan dari *Keidanren* ini dituangkan dalam proposal kebijakan berjudul *Seeking the Swift Conclusion of the TPP11*, yang menyatakan sebagai berikut (Keidanren, 2017):

"It is regrettable that the United States withdrew from the TPP in January 2017, as its participation was essential for the agreement to come into effect. However, in view of the economic and strategic significance of the agreement with respect to forging stability and prosperity in the Asia-Pacific region, we should not give up. Rather, the 11 remaining member countries should move forward to conclude the TPP (so-called TPP 11) in anticipation of the United States' eventual return to the agreement in the future."

Secara institusi politik, Jepang terdiri dari *House of Representatives (Lower House)* dan *House of Councillors (Upper House)*. *Lower house* Jepang dipilih dalam kurun waktu empat tahun sekali kecuali telah dibubarkan, sedangkan *Upper House* dipilih dalam kurun waktu tiga tahun sekali untuk memilih setengah dari anggotanya untuk masa jabatan enam tahun. *Lower House* memiliki kekuasaan yang lebih besar dari *Upper House* sehingga untuk proses meratifikasi perjanjian internasional, posisi *Lower House* penting dalam memastikan apakah perjanjian tersebut akan diratifikasi atau tidak.

Dalam aturan *Diet* Jepang, jika suatu peraturan telah diadopsi oleh *Lower House* dan ditolak atau diamendemen atau tidak disetujui dalam jangka waktu 60 hari oleh *Upper House*, maka peraturan itu bisa menjadi undang-undang kembali jika diadopsi oleh *Lower House* dengan

mayoritas dari setidaknya dua per tiga anggota yang hadir. Selain itu, jika kedua majelis/ dewan (*House*) tidak dapat setuju dalam masalah anggaran atau perjanjian, walaupun sudah ada penunjukan komite bersama di *Diet*, atau *Upper House* gagal melakukan persetujuan akhir dari anggaran atau perjanjian yang diajukan dalam jangka waktu 30 hari dari persetujuannya di *Lower House*, maka keputusan yang diambil oleh *Lower House* yang akan menjadi keputusan dari *Diet*.

Penjelasan di atas bisa dilihat dari kasus perjanjian TPP pemerintahan Shinzo Abe harus memiliki kursi mayoritas di *Lower House* dan *Upper House*, walaupun di *Lower House* menjadi mayoritas namun dari tahun 2010 posisi LDP dan Komeito saat Shinzo Abe menjabat masih menjadi minoritas baru pada tahun 2013 LDP dan Komeito menjadi mayoritas setelah berhasil memenangkan 65 kursi dari total kursi pada tahun 2010 84 kursi menjadi 115 kursi.

Pihak oposisi pemerintahan PM Abe, partai DPJ menggunakan isu TPP untuk menarik dukungan dari suara pemilih agrikultur tersebut. Hal tersebut berbanding terbalik dengan posisi DPJ pada tahun 2010-2012 yang mendukung untuk masuk dalam negosiasi TPP. Dalam pemilihan tahun 2015, lobi *JA Zenchu* terhadap anggota partai politik oposisi terus dilakukan, dalam pemilihan gubernur Prefektur Saga 11 Januari 2015 kandidat yang didukung oleh LDP kalah dari kandidat yang di dukung oleh *JA Zenchu*. Kekalahan tersebut merupakan kekalahan ketiga setelah Shiga dan Okinawa. Namun kekalahan di pemilu gubernur tidak diikuti dengan kekalahan di parlemen, karena pada tahun 2016 kursi LDP di *Upper House* bertambah menjadi 121 kursi, yang berarti semakin menguatkan posisi LDP untuk meratifikasi hasil perundingan TPP.

Dalam proses ratifikasi di Jepang, selain ratifikasi pada kesepakatan internasional, dibutuhkan juga undang-undang untuk penerapannya, sehingga

dalam ratifikasi perjanjian CPTPP, selain dari ratifikasi perjanjian CPTPP, diperlukan pula aturan implementasi kesepakatan CPTPP. Untuk ratifikasi perjanjian CPTPP, *Lower House* melakukan sidang pada bulan Mei dan telah disetujui pada 18 Mei 2018. Setelah persetujuan tersebut, proses kemudian berlangsung di *Upper House* Jepang untuk disahkan. Sedangkan untuk peraturan implementasi CPTPP baru selesai dibahas dan disetujui di *Lower House* pada 23 Mei 2018. Peraturan ini kemudian diadopsi ke dalam komite kabinet dengan mayoritas anggota dari komite ini adalah pendukung dari LDP. Peraturan tersebut berisi amandemen hukum domestik yang berhubungan dengan CPTPP termasuk bantuan terhadap petani.

Reformasi aturan juga dilakukan di komite kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan dari *Lower House* Jepang dengan menggunakan metode *work style reform bill* atau suatu metode untuk mengubah beberapa aturan yang telah ada sebelumnya hanya dengan satu aturan baru atau *comprehensive legal package bill*. Proses ratifikasi dan pembahasan undang-undang sempat tertunda karena adanya halangan partai oposisi, termasuk *Constitutional Democratic Party* yang mencoba untuk menghalangi hari voting peraturan dengan mengirimkan mosi tidak percaya untuk Shuichi Takatori sebagai ketua komite tersebut (Jiji Press English News Service, 2018). Mosi yang diajukan sebagai tekanan bagi pemerintah tidak berhasil dilakukan karena kurangnya anggota oposisi yang dapat mendukung untuk terpenuhinya kuota agar mosi tersebut bisa berjalan. Mosi tidak percaya yang dilontarkan tersebut dapat diatasi pada *Plenary Meeting* hari Kamis dan peraturan CPTPP diselesaikan melalui *work style reform bill* pada hari Jumat.

Di *Upper House*, ratifikasi CPTPP mulai dibahas pada 1 Juni 2018. Menurut undang-undang proses ratifikasi perjanjian internasional jika hasil yang terjadi di *Upper House* berbeda atau tidak setuju maka

ratifikasi tersebut masih tetap bisa berjalan namun beda dengan peraturan implementasi yang berhubungan dengan CPTPP yang tetap mendapat persetujuan. Peraturan implementasi CPTPP dalam *Plenary Meeting* di *Upper House* disetujui pada 29 Juni 2018 dengan mayoritas pilihan dari LDP dan Komeito (Jiji Press English News Service, 2018). *Diet* akhirnya menyetujui CPTPP pada 13 Juni dan peraturan yang berhubungan dengan CPTPP pada 29 Juni 2018. Proses ratifikasi dan pengundangan aturan implementasi CPTPP menandai suksesnya proses negosiasi yang dilakukan di level internasional dan level nasional.

KESIMPULAN

Kesuksesan liberalisasi perdagangan yang dilakukan oleh Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe tidak lepas dari caranya untuk menyukseskan proses tersebut. Pendekatan yang dilakukan oleh PM Shinzo Abe dengan melakukan pembentukan badan yang mengurus negosiasi level domestik dan level internasional berhasil membuat proses negosiasi menjadi efektif.

Dalam level internasional, strategi negosiasi paralel dengan AS menjadi kunci kesuksesan Jepang mempertahankan *win-sets*-nya dan menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima di dalam negeri. Strategi negosiasi paralel dalam kasus TPP digunakan dengan baik oleh Jepang

terutama karena Jepang masuk sebagai anggota TPP pada masa pertengahan perundingan telah berlangsung. Hal tersebut membuat Jepang mau tidak mau harus menerima kesepakatan yang telah disepakati dalam putaran negosiasi sebelumnya. Hal tersebut membuat Jepang membidik AS sebagai negara dengan ekonomi terbesar di TPP untuk mempertahankan *win-sets*-nya.

Pada negosiasi level domestik, kesuksesan kunci PM Abe adalah melakukan reformasi terhadap lembaga yang selama ini melakukan penentangan terhadap liberalisasi agrikultur. Reformasi *JA Zenchu* yang awalnya merupakan strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri dalam panah *Abenomic* terbukti menjadi reformasi yang membantu menyukseskan proses liberalisasi agrikultur di Jepang. Negosiasi Jepang di level internasional tidak akan berhasil untuk didomestikasi dalam negeri jika Jepang gagal untuk melakukan reformasi terhadap kelompok *JA Zenchu*. Distribusi kekuasaan dalam bentuk jumlah anggota partai LDP dan koalisinya Komeito di dua kamar *Diet* juga membantu untuk Jepang melakukan ratifikasi disertai undang-undang penerapannya. Dalam kasus liberalisasi perdagangan CPTPP, negosiasi di level dalam negeri merupakan faktor terbesar kesuksesan proses negosiasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Makalah Penelitian

- Cooper, W. H. dan Manyin, M. E. (2013). *Japan's Possible Entry Into The Trans-Pacific Partnership and Its Implications*. Washington D.C.: Congressional Research Service.
- Brooks, W. (2015). Politics and Trade Policy in Japan: Trans-Pacific Partnership Negotiations. *Asia-Pacific Policy Papers Series*, No. 18.

- Davis, C. (2018). Japan: Interest Group Politics, Foreign Policy Linkage and the TPP. Dalam Benedict Kingsbury, David M. Malone, Paul Mertenskötter, Richard B. Stewart, Thomas Streinz, and Atsushi Sunami (Eds.), *Contested Megaregulation: Global Economic Ordering After TPP*, Chapter 6.
- Hamanaka, S. (2014). TPP Versus RCEP: Control of Membership and Agenda Setting. *Journal of East Asia Economic Intergration*, 18(2), 163-186. DOI:

- <http://dx.doi.org/10.11644/KIEP.JEA.L.2014.18.2.279>.
- Kagitani, K. (2018). Electoral Rules and Free Trade Agreements as a Campaign Issue: The Case of Political Disputes Over the Trans-Pacific Partnership in Japan. *Japan & The World Economy*, 49(C), 126-137. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.japwor.2018.10.004>.
- Krauss, E. (1995). *Japan's Democracy: How Much Change?*. Ithaca: Foreign Policy Association.
- Mulgan, A. G. (2015). To TPP or Not TPP: Interest Groups and Trade Policy. Dalam A. G. Mulgan, & M. Honma, *The Political Economy of Japanese Trade Policy*. New York: Palgrave Macmillan.
- Mulgan, A. G. (2016). Much Ado About Something? The Abe Government's Reform of Japan's Agricultural Cooperatives (JA). *Japan Studies*, 36(1), 83-103. DOI: 10.1080/10371397.2016.1189311
- Neuman, L. (2003). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* [Fifth Edition]. Boston: Allyn and Bacon.
- Nurdiniyah, H. (2016). *Kebijakan Perdana Menteri Shinzo Abe Dalam Mendukung Sektor Pertanian dan Kaitannya Dengan Keikutsertaan Jepang dalam Perundingan Trans-Pacific Partnership (TPP)*. Tesis Magister. Jakarta: Fakultas Pascasarjana Program Studi Kajian Wilayah Jepang, Universitas Indonesia.
- Putnam, R. (1988). Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games. *International Organization*, 42 (3), 427-460.
- Sasada, H. (2013). The Impact of Rural Votes in Foreign Policies: The FTA Policies under the DPJ Government in Japan. *Asia Journal of Political Science*, 21(3), 224-248.
- Shinoda, T. (2019). Two-level Game Analysis of Japan in The TPP Negotiations. *Asian Journal of Comparative Politics*, XX(X), 1-14. DOI: 10.1177/2057891119865025.
- Solis, M dan Urata, S. (2018). Abenomic and Japan's Trade Policy in A New Era. *Asia Economic Policy Review*, 13(1), 106-123.
- Terada, T. (2015). The Abe Effect and Domestic Politics. *Asian Perspective*, 39(3), 381-403.
- Terada, T. (2019). Japan and TPP/TPP-11: Opening Black Box of Domestic Political Alignment for Proactive Economic Diplomacy in Face of 'Trump Shock'. *The Pacific Review*, 32 (6), 1041-1069. DOI: 10.1080/09512748.2019.1617771.

Artikel Daring

- Jiji Press English News Service. (2018, 6 Juli). "Japan Completes Domestic Procedures to Ratify New TPP." Diakses dari <https://search.proquest.com/docview/2065018559?accountid=17242>.
- Keidanren. (2017, Oktober 23). "Seeking the Swift Conclusion of the TPP11." Diakses dari <http://www.keidanren.or.jp/en/policy/2017/085.html>.
- Sim, W. (2017, 21 April). "Australia, Japan Lobby for TPP-11." Diakses dari <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/australia-japan-lobby-for-tpp-11>.
- Takashi, T. (2015a, 5 Februari). "Assessing Abe's Economic Agenda: Abenomics, TPP, and Domestic Politics." Diakses dari <http://www.theasanforum.org/assessing-abes-economic-agenda-abenomics-tpp-and-domestic-politics/>.
- Takashi, T. (2015b, 32 Oktober). "Japan and the TPP Conclusion: Regional Order, Negotiations, and Domestic Adjustment." Diakses dari <http://www.theasanforum.org/japan-and-the-tpp-conclusion-regional->

order-negotiations-and-domestic-
adjustment/.

The Japan Times. (2015, 9 April). "JA Chief
Resigns After Farm Reform Battle
with Abe." Diakses dari

[https://www.japantimes.co.jp/news/
2015/04/09/business/ja-chief-
resigns-after-farm-reform-battle-
with-abe/](https://www.japantimes.co.jp/news/2015/04/09/business/ja-chief-resigns-after-farm-reform-battle-with-abe/).